

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Ade Kasih Supriatna dan Nanang Nugraha, 2017, *Restorasi Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menuju Good Governance di Indonesia*, Jatinangor; Alqaprint Jatinangor
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Kencana.
- Andi Pangeran Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok; Rajawali Pers.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang; Formaci.
- Miftah Thoha. 2016. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Muslan. Abdurahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang; UMM Press.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Sirajuddin. Et.al. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahanan Daerah*. Malang; Setara Press.
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerdjono Soekanto. 2012. *Pengantar Peneliitian Hukum Normatif* Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta; Thafa Media
- Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta; Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika

Skripsi/Tesis/Disertasi

Arifuddin N. 2018. *Eksistensi Wakil Kepala daerah Dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nur Afiat Syamsul. 2017. *Konstitusionalitas Jabatan Wakil Kepala daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal/Artikel

Cynthia Hadita. 2021. *Eksistensi Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Implikasi Dan Solusi Terhadap Pemerintahan Daerah*. Jurnal Buletin Konstitusi UMSU. Sumatera Utara. Volume II, No. 1. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

Muhammad Zainul Arifin, dan Rio Muzani Rahmatullah. 2019. *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jurnal Hukum Thengkyang. Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti. Palembang. Volume 3 Nomor 1. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023.

Rahma A, Fifiana W. 2018. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)*, Jurnal Undip E-Journal System, Semarang Jilid 47 Nomor 3. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

Tri Suhendra Arbani. 2018. *Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Hukum Wacana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Surakarta. Volume 14 Nomor 2. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Konawe Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe masa jabatan 2019-2024

Sumber Internet

Anonim, 2023, "Daftar Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Tenggara" Diakses pada tanggal 20 Februari 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana di Sulawesi Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah_petahana_di_Sulawesi_Tenggara)

Anonim, 2023, "Daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana di Jawa Timur", Diakses pada tanggal 3 Maret 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana di Jawa Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah_petahana_di_Jawa_Timur)

Anonim, 2021, “Gubernur Kalteng Lantik Bupati Pulang Pisau Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023” Diakses pada tanggal 20 Februari 2023
<https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/gubernur-kalteng-lantik-bupati-pulang-pisau-sisa-masa-jabatan-tahun-2018-2023>

Ari Maryadi, 2023, “Sudah 2 Tahun Bupati Lutim Budiman Jomblo, Akbar Andi Leluasa Tak Kunjung Dilantik Jadi Wabup”. Diakses Pada 9 September 2024
https://makassar.tribunnews.com/2023/06/28/sudah-2-tahun-bupati-lutim-budiman-jomblo-akbar-andi-leluasa-tak-kunjung-dilantik-jadi-wabup#google_vignette

Fachruddin Arrazi, 2022, “Jabatan 2 Wakil Kepala Daerah di Sumbar Kosong”, Diakses pada tanggal 20 Februari 2023
<https://padangkita.com/jabatan-2-wakil-kepala-daerah-di-sumbar-kosong/>

Heru Dahnur, Teuku Muhammad Valdy Arief, 2022, “3 Bulan Kursi Wakil Bupati Bangka Tengah Kosong, Agenda Pembangunan Terganggu” Diakses pada tanggal 20 Februari 2023
<https://regional.kompas.com/read/2022/09/01/140152778/3-bulan-kursi-wakil-bupati-bangka-tengah-kosong-agenda-pembangunan>